

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH  
(STUDI KASUS LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LKPD  
KABUPATEN ACEH TIMUR KHUSUS PADA LAPORAN REALISASI  
ANGGARAN)**

**Ryanda Saputra<sup>1</sup>, Desyana Putri<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Fakultas Ekonomi, Universitas Samudra

[ryanda.saputra@unsam.ac.id](mailto:ryanda.saputra@unsam.ac.id)<sup>1</sup>, [desyanaputri@unsam.ac.id](mailto:desyanaputri@unsam.ac.id)<sup>2</sup>

**ABSTRACT**

*This research aims to examine the financial performance of the local government Aceh Timur Regency. This analysis uses regional financial independence ratios, financial efficiency ratios, PAD effectiveness ratios, and the ratio of harmoni to assess financial performance. This study is included in the category of quantitative descriptive research. The data used comes from the Financial Report of the local government Aceh Timur Regency for the 2019-2023 budget period. Financial ratio analysis is the method used to perform this analysis. As shown by the research results, the financial performance of the Aceh Timur Regency Government is still far from optimal. Regional Original Revenue Management is still not successful, and regional finances are still inefficient. In addition, the level of regional independence is still low, as shown by the increase in central government assistance compared to the regional original income of Aceh Timur Regency.*

**Keywords:** *financial independence ratio, financial efficiency ratio, PAD, effectiveness ratio, harmony ratio.*

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk memeriksa kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Timur. Analisis ini menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efisiensi keuangan, rasio efektivitas PAD, dan rasio keserasian untuk menilai kinerja keuangan. Studi ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan berasal dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur pada periode anggaran 2019-2023. Analisis rasio keuangan adalah metode yang digunakan untuk melakukan analisis ini. Seperti yang ditunjukkan oleh hasil penelitian, kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur masih jauh dari optimal. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah masih belum berhasil dan keuangan daerah masih kurang efisien. Selain itu, tingkat kemandirian daerah juga masih rendah, seperti yang ditunjukkan oleh peningkatan bantuan pemerintah pusat dibandingkan dengan pendapatan asli daerah Kabupaten Aceh Timur.*

**Keywords:** *Rasio kemandirian keuangan, rasio efisiensi keuangan, rasio efektivitas PAD, rasio keserasian*

**I. PENDAHULUAN**

Aceh merupakan salah satu provinsi dalam bingkai NKRI telah menciptakan sejarah perjuangan yang sangat panjang, tepat pada tahun 2004 dan 2005 aceh mengalami sejarah yang tak terlupakan. Tahun 2004 musibah maha dahsyat Tsunami melanda Aceh menyebabkan kerusakan yang sangat besar, baik infrastruktur maupun kehidupan masyarakat Hal ini mendorong pemerintah pusat untuk memberikan perhatian khusus, dan selanjutnya pada tahun 2005 disepakati perjanjian damai antara Pemerintah Republik Indonesia (RI) dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menandai

berakhirnya konflik bersenjata. Sehingga Aceh mendapat pemberian otonomi khusus dan salah satu poin yang disepakati dalam perjanjian ini adalah dukungan finansial atau dana alokasi khusus untuk Aceh.

Sumber transfer dari pemerintah pusat yaitu dana alokasi khusus memiliki peran yang penting dalam percepatan pembangunan di aceh, karena sumber DAK ini tidak dimiliki oleh semua provinsi yang ada di Indonesia. Oleh karenanya, kinerja keuangan dari pemerintah daerah yang baik sangat diharapkan agar harapan untuk terciptanya percepatan kesejahteraan masyarakat dapat segera terwujud.

Kabupaten Aceh Timur merupakan bagian dari kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh, dengan wilayah yang paling luas dan termasuk dalam katagori *top three* kabupaten yang menerima total transfer pendapatan paling besar se-kabupaten/kota di Provinsi Aceh dalam periode anggaran 2019-2024. Kabupaten Aceh Timur terdapat garis pantai yang sangat panjang dan hamparan daratan yang luas serta wilayah laut yang sangat luas sehingga wilayah ini memiliki sektor kunci yang sangat potensial untuk memaksimalkan perolehan PAD yang akan berdampak terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi lokal. Beberapa sector kunci yang dapat dimanfaatkan adalah: sektor perikanan, pertanian, perkebunan, pengelolaan hutan, sumber daya alam dan pariwisata serta berbagai macam retribusi pengelolaan pasar, terminal dan lain-lain.

**Tabel 1.** Gambaran Wilayah Objek Penelitian

Deskripsi Wilayah	Jumlah	Keterangan
Luas Wilayah	5432.63	Terluas di Aceh
Jumlah Kecamatan	24	Posisi Kedua Terbanyak di Aceh
Jumlah Desa	515	Posisi Kelima Terbanyak di Aceh
Jumlah Penduduk	443.638	Posisi Kedua Terbanyak di Aceh
Total rata-rata pendapatan daerah dalam periode anggaran 2019-2023	1.823.692.903.997,85	Posisi ketiga terbesar setelah Kabupaten Aceh Utara dan Pidie

BPS, 2024

Kinerja keuangan daerah merujuk pada seberapa efektif dan efisien serta tingkat kemandirian dan keserasian dalam suatu pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan dan belanja daerah untuk mencapai tujuan pembangunan. Menurut Mardiasmo (2016:30) dengan otonomi terdapat dua aspek kinerja keuangan yang dituntut agar lebih baik dibanding dengan sebelum otonomi daerah. Aspek pertama adalah bahwa daerah diberi kewenangan mengurus pembiayaan daerah dengan kekuatan utama pada kemampuan pendapatan asli daerah. Kehadiran UU nomor 34 tahun 2000 tentang pendapatan pajak dan retribusi daerah serta peraturan pelaksanaannya adalah momentum dimulainya pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah secara penuh (desentralisasi fiskal). Aspek kedua yaitu disisi manajemen pengeluaran daerah, sesuai azas otonomi daerah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus lebih akuntabel dan transparan tentunya menuntut daerah agar lebih efisien dan efektif dalam pengeluaran daerah, kedua aspek tersebut dapat disebut sebagai reformasi pembiayaan.

Menilai kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya, antara lain adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil analisis rasio keuangan selanjutnya dipergunakan sebagai tolak ukur dalam menilai (Halim, 2012), yaitu

1) Kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan; 2) Efisiensi dan efektivitas dalam merealisasikan pendapatan daerah; 3) Sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya; 4) Kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah; 5) Pertumbuhan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan suatu ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat atau sumber dana eksternal, dengan catatan yaitu semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah semakin rendah tingkat ketergantungannya pada sumber dana eksternal atau dana dari pemerintah pusat (Halim, 2012). Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam mengefisienkan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Rasio Efektifitas dilakukan untuk menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan yang telah direncanakan sebelumnya. Dan setelah itu dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi yang dimiliki oleh pemerintah daerah (Mardiasmo, 2013). Kemudian, untuk Rasio Keserasian yaitu rasio yang menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dana yang dimiliki untuk belanja rutin dan belanja pembangunan dengan optimal (Halim, 2012). Sedangkan, untuk Rasio Pertumbuhan yaitu rasio yang menggambarkan apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan atau selama beberapa periode, kinerjanya mengalami pertumbuhan atau tidak (Mahmudi, 2016).

Pemerintah Kabupaten Aceh Timur sebagai penyelenggara yang berwenang mengelola APBK dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya.

Pengamatan awal peneliti berdasarkan tabel diatas bahwa pada tahun 2022 realisasi pendapatan daerah Kabupaten Aceh Timur sebanyak Rp 1.809,998.110.417 atau sebesar 97.77% dari APBK

**Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja dan Pembiayaan TA 2022 dan 2021**

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1.	Pendapatan	1.809.998.110.417,00	1.769.569.785.313,44	97,77	1.811.878.762.006,61
2.	Belanja	1.853.743.821.826,00	1.760.001.776.398,31	94,94	1.838.593.600.642,38
3.	Pembiayaan	43.745.711.409,00	43.745.711.409,89	100,00	89.923.491.245,66
<b>SILPA</b>		<b>0,00</b>	<b>53.313.720.325,02</b>	<b>0,00</b>	<b>63.208.652.609,89</b>

Sumber: SIMDA Keuangan

Kabupaten Aceh Timur. Sedangkan, untuk realisasi belanja daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Timur sebesar Rp 1.760,001.776.398,31 atau sebesar 94,94% dari APBK Kabupaten Aceh Timur. Berdasarkan hal tersebut, terdapat surplus anggaran sebesar Rp 53.313.720.325,02. Namun, Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya, realisasi anggaran tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp 42.308.976.693,17 atau 2,34%.

**Tabel 3.** Rincian PAD TA. 2022 dan 2021

**Rincian Pendapatan Asli Daerah TA 2022 dan 2021**

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1.	Pajak Daerah	18.097.500.000,00	17.357.692.096,16	95,91	14.295.455.459,00
2.	Retribusi Daerah	1.573.000.000,00	1.040.796.660,00	66,17	768.658.840,00
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2.000.000.000,00	1.669.455.900,00	83,47	1.656.097.046,00
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	112.367.645.123,00	133.477.969.948,56	118,79	105.658.526.620,19
<b>Jumlah</b>		<b>134.038.145.123,00</b>	<b>153.545.914.604,72</b>	<b>114,55</b>	<b>122.378.737.965,19</b>

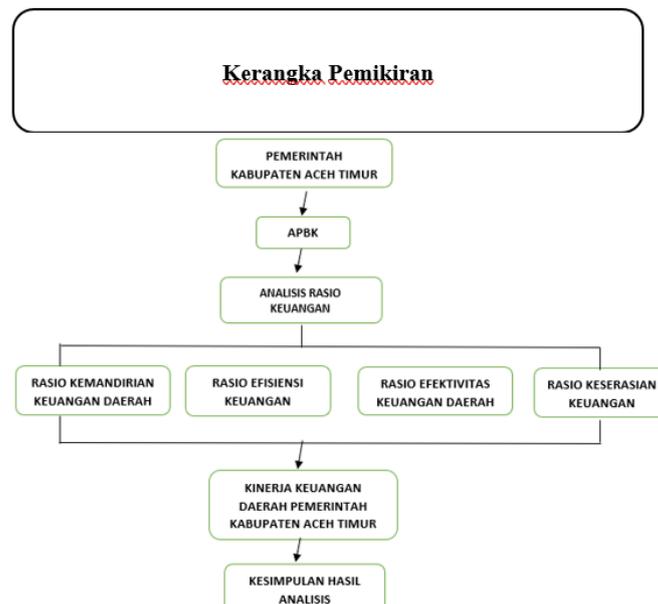
Sumber: SIMDA Keuangan

Dari tabel diatas dapat kita amati bahwa capaian perolehan PAD Tahun Anggaran 2022 yaitu Rp 153.545.914.604,72 atau 114,55% dari penetapan target sebesar Rp 134.038.145.123,00, Jika dibandingkan dengan realisasi perolehan PAD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp122.378.737.965,19 maka capaian perolehan 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp31.167.176.639,53 atau 25,47%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Realisasi pendapatan dan Belanja TA 2022 lebih rendah dibanding

Realisasi pada TA 2021. Namun, kemampuan dalam capaian perolehan PAD Tahun Anggaran 2022 lebih tinggi dibanding Tahun Anggaran 2021.

Menurut Abdul Halim (2004), analisis rasio keuangan merupakan upaya untuk mengetahui karakteristik keuangan daerah sesuai dengan laporan pengelolaan keuangan yang ada. Analisis keuangan yang sesuai dengan APBD dilakukan dengan menghitung dan membandingkan hasil dari beberapa tahun. Analisis rasio keuangan terhadap APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang sudah ditentukan dan dilaksanakan merupakan metode untuk melihat kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan.

Berbagai penelitian mengenai kinerja keuangan daerah telah dilakukan oleh berbagai akademisi antara lain dilakukan oleh Putri dan Yuliafitri (2024) yang menyatakan bahwa Efektivitas anggaran belanja pada 22 Dinas Kota Bandung dari Tahun Anggaran 2019 hingga 2022 umumnya belum mencapai atau melampaui target anggaran operasional yang telah dianggarkan. Pada tingkat efisiensi anggaran belanja, hasil penelitian menunjukkan bahwa telah berhasil menghemat anggaran operasional. Tingkat efisiensi ini mendapatkan predikat "sangat efisien" dengan persentase sebesar 15%. dalam penelitian Geatri, Natalian dan Bharata (2023) juga melakukan penelitian tentang kinerja keuangan daerah dan hasilnya menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih jauh dari optimal. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah telah terbukti berhasil, tetapi keuangan daerah masih kurang efisien. Selain itu, tingkat kemandirian daerah juga masih rendah, seperti yang ditunjukkan oleh peningkatan bantuan pemerintah pusat dibandingkan dengan pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan, hasil penelitian Irnawati, Saripuddin dan Abidin (2023) menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah pemerintah Kota Makassar dari tahun 2017-2021 yaitu 59,25% dengan kriteria sedang, yang berarti terjadi pola hubungan partisipatif. Rasio efektivitas keuangan daerah pemerintah Kota Makassar dari tahun 2017-2021 yaitu 82,53% dengan kriteria kurang efektif. yang berarti bahwa program yang dilakukan pemerintah Kota Makassar belum dapat memenuhi tujuan yang ditetapkan. Rasio pertumbuhan keuangan daerah pemerintah Kota Makassar dengan rasio pertumbuhan PAD dari tahun 2017-2021 yaitu -2,59% dengan kriteria pertumbuhan negatif, yang berarti bahwa pemerintah daerah Kota Makassar dalam tahun anggaran 2017-2021, kinerjanya tidak mengalami pertumbuhan pendapatan yang positif. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan variabel rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi dan rasio keserasian. Adapun kerangka pemikiran yang dikembangkan adalah sebagai berikut:



Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Kinerja Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur sudah Mandiri yang dinilai dari Rasio Kemandirian?
2. Apakah Kinerja Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur sudah Efektif, yang dinilai dari Rasio Efektifitas?
3. Apakah Kinerja Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur sudah Efisien, yang dinilai dari Rasio Kemandirian?
4. Apakah Kinerja Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur sudah Seearasi, yang dinilai dari Rasio Keserasian?

## II. METODE PENELITIAN

### Desain Penelitian

Penelitian adalah suatu proses dari langkah-langkah yang digunakan untuk mengumpulkan data dan menganalisis informasi suatu topik atau isu (Creswell, 2014). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yang menggunakan perhitungan data keuangan. Dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efisiensi keuangan, rasio efektifitas dan rasio keserasian. Penelitian ini menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Timur.

### Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini merupakan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Untuk objek penelitiannya yaitu Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Aceh Timur Periode Anggaran 2019 – 2023.

### Teknik Pengumpulan Data

Laporan realisasi keuangan APBK Pemerintah Kabupaten Aceh Timur adalah sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini. Data ini diperoleh dari portal resmi layanan EPPID pusat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia

### Teknik Analisis Data

Untuk memecahkan masalah penelitian ini, teknik analisis data deskriptif kuantitatif digunakan untuk melakukan perhitungan data keuangan. Berikut adalah beberapa tolak ukur yang digunakan dalam teknik analisis ini:

#### 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana daerah mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan melalui sumber pendapatan asli daerah (PAD) tanpa bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat atau sumber pendanaan lainnya. Rasio ini dihitung dengan membandingkan total PAD dengan total pendapatan daerah. Adapun rumusnya adalah:

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = (\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)} / \text{Total Pendapatan Daerah}) \times 100\%$$

Semakin tinggi nilai rasio tersebut, semakin rendah tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan luar, begitupun sebaliknya. Rasio kemandirian keuangan daerah meningkat seiring dengan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan daerah; semakin tinggi rasio ini, semakin banyak upaya masyarakat untuk terlibat dalam pembayaran retribusi dan pajak, yang merupakan sumber utama

pendapatan daerah. Tingkat pembayaran pajak dan retribusi digunakan untuk menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Tabel berikut dapat digunakan sebagai referensi untuk menentukan pola hubungan antara kemampuan daerah dari sisi keuangan :

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber: Halim, 2001

## 2. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi keuangan daerah adalah ukuran yang digunakan untuk menilai seberapa efektif suatu daerah dalam mengelola dan menggunakan sumber daya keuangannya untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan. Rasio ini menggambarkan seberapa baik daerah tersebut menggunakan pendapatan yang ada untuk membiayai belanja daerah. Rumus untuk menghitung rasio efisiensi keuangan daerah adalah:

$$\text{Rasio Efisiensi Keuangan Daerah} = (\text{Realisasi Belanja Daerah} / \text{Realisasi Pendapatan Daerah}) \times 100\%$$

Jika nilai risiko kurang dari satu (1) atau di bawah 100%, kinerja keuangan pemerintah daerah sehubungan dengan pendapatan yang diterima dan dihasilkan dianggap efisien. Semakin rendah rasio efisiensi keuangan daerah, semakin bagus kinerja keuangan pemerintahnya. Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus menghitung biaya yang dikeluarkan dengan teliti pada saat melakukan pemungutan pendapatan seluruh pendapatan untuk menentukan apakah proses itu efektif atau tidak, Adapun kriteria efisiensi kinerja keuangan adalah sebagai berikut:

Persentase Efisiensi	Kriteria Efisiensi
>100%	Tidak Efisien
100%	Efisien Berimbang
<100%	Efisien

Sumber: Mahsun, 2012

## 3. Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana daerah dapat mengoptimalkan pendapatan yang dihasilkan dari sumber-sumber asli daerah. Rasio ini memberikan gambaran tentang efektivitas pengumpulan PAD dibandingkan dengan potensi pendapatan yang ada. Cara menghitung rasio efektivitas yaitu melalui perbandingan antara PAD yang telah diterima dan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk menghitung rasio efektivitas, rumus berikut digunakan:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = (\text{Realisasi Penerimaan PAD} / \text{Target Pendapatan Asli Daerah}) \times 100\%$$

Persentase Efektivitas	Kriteria Efektivitas
>100%	Tidak Efektif
100%	Efektif Berimbang
<100%	Efektif

Sumber: Mahsun, 2012

#### 4. Rasio Keserasian

##### a. Belanja Operasi

Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja aparatur dan belanja pelayanan public secara optimal. Dalam penelitian ini digunakan proporsi belanja publik karena belanja publik secara langsung dimaksudkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Rasio keserasian diukur dengan membandingkan realisasi total belanja operasi dengan total belanja daerah dalam satuan persen. rasio ini dihitung dengan:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = (\text{Total belanja Operasi/Realisasi Belanja Operasi}) \times 100\%$$

Dengan mengetahui hasil perbandingan antara realisasi belanja dan anggaran belanja daerah dengan menggunakan ukuran efisiensi tersebut, maka penilaian kinerja keuangan dapat ditentukan sebagai berikut Mahsun (2014:154)

- 1) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ( $x < 100\%$ ) berarti kurang serasi.
- 2) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ( $x = 100\%$ ) berarti serasi.
- 3) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ( $x > 100\%$ ) berarti sangat serasi.

##### b. Belanja Modal

Menurut PSAP Nomor 02, Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Cara mendapatkan belanja modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender (PP Nomor 71, 2010). Sedangkan menurut Halim (2004:73), Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum.

Alokasi belanja modal dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = (\text{Total Belanja Modal/Realisasi Belanja Modal}) \times 100\%$$

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Aceh Timur terdapat garis pantai yang sangat panjang dan daratan serta wilayah laut yang sangat luas sehingga wilayah ini memiliki sector-sektor kunci yang sangat potensial untuk memaksimalkan perolehan PAD yang berdampak terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi local. Beberapa sector kunci yang dapat dimanfaatkan adalah: sector perikanan, pertanian dan perkebunan, pengelolaan hutan, sumber daya alam dan pariwisata serta pelbagai macam retribusi pengelolaan pasar, terminal dan lain-lain.

Pendapatan Kabupaten Aceh Timur dalam kurun waktu 5 tahun terakhir selalu masuk dalam katagori Tiga teratas (*Top Three*) di provinsi Aceh, hal ini merupakan peluang dan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk dapat melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakatnya.

**Analisis Rasio Keuangan**

**1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Rasio kemandirian keuangan pada pemerintah daerah dapat dinilai dari kontribusi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah terhadap total pendapatan transfer yang diperoleh oleh suatu pemerintah daerah. Dalam kajian deskripsi dan analisis APBD 2011 oleh kementerian keuangan Republik Indonesia Direktorat pengembangan Keuangan menyebutkan bahwa Rasio PAD terhadap totalnya memiliki makna yang berbeda atas angka-angkanya, Rasio PAD terhadap totalnya memiliki makna yang berkebalikan dengan rasio transfer terhadap total pendapatan. Semakin besar angka rasio PAD maka kemandirian daerah semakin besar. Sebaliknya, makin besar angka rasio transfer, maka semakin kecil tingkat kemandirian daerah dalam mendanai belanja daerah. Oleh karena itu daerah yang memiliki tingkat kemandirian yang baik adalah yang memiliki rasio PAD yang tinggi sekaligus rasio transfer yang rendah.

**Tabel 4.** Penghitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2019-

Tahun	PAD (dalam milliar rupiah)	Pendapatan Transfer (dalam milliar rupiah)	RKKD %	Kemampuan Keuangan	Pola Hubungan
2019	185.148,99	1.742.941,97	11%	Rendah Sekali	Instruktif
2020	198.202,22	1.593.653,00	12%	Rendah Sekali	Instruktif
2021	122.378,19	1.621.724,00	8%	Rendah Sekali	Instruktif
2022	153.545,72	1.603.864,72	10%	Rendah Sekali	Instruktif
2023	162.687,89	1.605.695,00	10%	Rendah Sekali	Instruktif

2023

Sumber : Data Olahan

Rasio kemandirian keuangan Kabupaten Aceh Timur mempunyai rata-rata 10% selama periode (2019 – 2023), yang menempatkannya dalam kategori kemampuan keuangan rendah sekali dengan pola hubungan Instruktif. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat rendah terhadap total pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten (APBK), Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Aceh Timur masih sangat bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi serta belum mampu memenuhi kebutuhan belanja daerahnya secara mandiri.

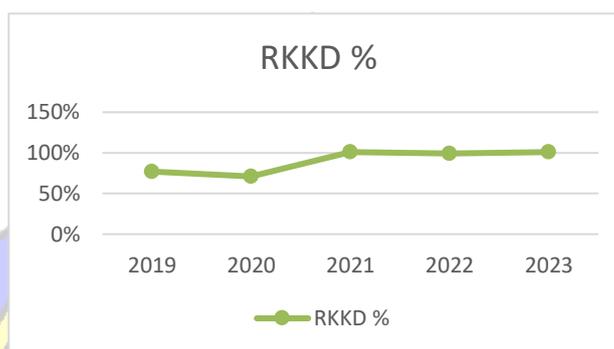
**2. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah**

Rasio efisiensi berfokus pada evaluasi seberapa baik pemerintah dalam mengelola sumber daya keuangannya untuk mencapai hasil yang diinginkan. Berikut tabel perhitungan efisiensi Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.

**Tabel 5.** Penghitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2019-2023

Tahun	Belanja Daerah (dalam milliar rupiah)	Pendapatan Daerah (dalam milliar rupiah)	RKKD %	Kriteria
2019	1.498.767,86	1.939.152,11	77%	Efisien
2020	1.291.966,93	18.271.725,22	71%	Efisien
2021	1.838.593,38	1.811.878,61	101%	Tidak Efisien
2022	1.760.001,31	1.769.569,44	99%	Kurang Efisien
2023	1.782.018,95	17.706.912,89	101%	Tidak Efisien

Berdasarkan perhitungan rasio efisiensi pada tabel di atas, secara rata-rata dapat diamati bahwa perhitungan rasio efisiensi pemerintah daerah Kabupaten Aceh Timur pada tahun anggaran 2019-2023 yaitu 89,8 %, tergolong lebih efisien jika dibandingkan rasio efisiensi tahun anggaran 2010- 2018 pada pemerintah Kabupaten Aceh Timur dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Krisniawati et,al (2021) yaitu rata-rata rasio efisiensi sebesar 92,5%, artinya terjadi peningkatan efisiensi sebesar 2,7%. Dan juga lebih efisien jika dibandingkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (wahyuddin dan sugianal, 2017) pada pemerintah kota lhokseumawe pada tahun anggaran 2011-2016 menunjukkan rata-rata efisiensi kinerja keuangan pemerintah kota lhoksumawe sebesar 96,59%. Kriteria efisiensi dalam persentase kinerja keuangan pemerintah daerah menurut kemandagri Nomor 690.900.327 tahun 1996 tentang pedoman penilaian kinerja keuangan yang sangat efisien adalah kurang dari 60%, nilai persentase rata-rata pemerintah aceh timur pada tahun anggaran 2019-2023 yaitu 89,9% maka tergolong dalam kriteria cukup efisien terhadap alokasi realisasi belanja daerah untuk perolehan PAD.



Jika mengamati trend pergerakan kurva diatas berdasarkan tahun ke tahun (2019-2023), dimana pada tahun 2019 rasio efisiensi sebesar 77% tergolong dalam kriteria efisien, kemudian pada tahun 2020 rasio efisiensi sebesar 71%, pergerakan dari tahun 2019 ke tahun 2020 menunjukkan peningkatan efisiensi yang baik atau meningkat sebesar 6%, namun dari tahun 2020 – 2023 trend pergerakan rasio efisiensi mengalami pergerakan yang sangat tidak baik, bahkan tergolong dalam kriteria tidak efisien. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten aceh timur tidak konsisten dalam melakukan efisiensi terhadap pengeluaran belanja daerah untuk mengoptimalkan perolehan PAD.

Pemerintah daerah kabupaten aceh timur harus terus berupaya dan menyusun strategi dan rencana eksekusi yang baik dan terukur dalam meningkatkan efisiensi dalam penegleolaan keuangan dan mengoptimalkan perolehan PAD dari belanja yang dikeluarkan pada tahun-tahun berikutnya.

### 3. Rasio Efektivitas PAD

Tabel 6. Penghitungan Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2019-2023

Tahun	Realisasi PAD (dalam milyar rupaiah)	Target PAD (dalam milyar rupaiah)	Rasio Efektivitas PAD	Kriteria
2019	185.148,99	202.093,87	92%	Tidak Efektif
2020	198.202,22	210.849,00	94%	Tidak Efektif
2021	122.378,19	118.041,00	104%	Efektif
2022	153.545,72	134.038,00	115%	Efektif
2023	162.687,89	175.928,00	92%	Tidak Efektif

Tabel diatas merupakan perhitungan tingkat kemampuan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam mencapai target perolehan PAD daerahnya, dari perhitungan tabel diatas dapat kita amati bahwa

secara rata-rata rasio efektivitas PAD tahun anggaran 2019-2023 yaitu 99,26%. Sehingga dapat disimpulkan secara rata-rata perolehan PAD dalam tahun anggaran 2019-2023 belum mampu mencapai 100% atau bahkan melampaui, secara kriteria pencapaian masih tergolong dalam kriteria tidak efektif. Namun, jika dilihat secara terpisah, pada tahun anggaran 2019, 2020 dan 2023 pencapaian perolehan PAD dibanding dengan target perolehan masih tergolong dalam kriteria tidak efektif, sedangkan pada tahun 2021 dan 2022 pencapaian perolehan PAD sangat baik dan bahkan melampaui 100% sehingga tergolong dalam kriteria efektif. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Aceh Timur perlu menjaga konsistensi dan melakukan pertumbuhan perolehan PAD dari waktu ke waktu, serta didukung dengan menyusun potensi yang sesuai dengan kondisi riil dan strategi pencapaian perolehan dari waktu ke waktu yang efektif, harapannya mulai pada tahun 2024 dan seterusnya dapat terjadi pertumbuhan yang positif dari waktu ke waktu, dengan tercapainya target perolehan PAD yang efektif akan sangat membantu Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam melakukan belanja yang tepat untuk mensejahterakan masyarakat dan melakukan investasi yang tepat agar dapat terciptanya pertumbuhan dalam perolehan PAD yang lebih tinggi di tahun-tahun yang akan datang.

**4. Rasio Keserasian**

Rasio Keserasian akan menampilkan berapa besar alokasi belanja daerah yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah yang dampaknya dapat langsung dirasakan manfaat oleh masyarakat ataupun tidak secara langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat atau bahkan tidak ada dampak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti menganalisa rasio keserasian melalui pengukuran rasio belanja modal terhadap belanja operasional.

**Tabel 7.** Penghitungan Rasio Keserasian Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2019-2023 (**Belanja Operasi**)

Tahun	Total Belanja (dalam milyar rupiah)	Realisasi Belanja Operasi (dalam milyar rupiah)	Rasio Belanja Operasi
2019	1.498.767,86	1.106.762,54	74%
2020	1.291.966,93	1.036.950,49	80%
2021	1.838.593,38	1.113.741,38	61%
2022	1.760.001,31	1.102.250,31	63%
2023	1.782.018,95	1.187.487,95	67%

Sedangkan hasil dari perhitungan Rasio Keserasian Belanja Modal dapat dilihat pada table dibawah ini:  
**Tabel 8.** Penghitungan Rasio Keserasian Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2019-2023 (**Belanja Modal**)

Tahun	Total Belanja (dalam milyar rupiah)	Realisasi Belanja Modal (dalam milyar rupiah)	Rasio Belanja Modal
2019	1.498.767,86	390.860,32	26%
2020	1.291.966,93	234.206,44	18%
2021	1.838.593,38	251.516,00	14%
2022	1.760.001,31	200.192,00	11%
2023	1.782.018,95	254.415,00	14%

Analisis rasio keserasian dalam penelitian ini dibagi menjadi rasio belanja operasi dan rasio belanja modal. Rasio belanja operasi Kabupaten Aceh Timur dari tahun 2019-2023 mengalami

fluktuasi. Dimulai dari tahun 2019 sebesar 74%, pada tahun 2020 terjadi peningkatan menjadi 80%. Kemudian pada tahun 2021 turun menjadi 61%, pada tahun 2022 kembali meningkat menjadi 63% dan di tahun 2014 mengalami lagi kenaikan menjadi 67%. Jika kita melihat rata-rata rasio operasi pada Kabupaten Aceh Timur dalam periode anggaran tahun 2019-2023 yaitu sebesar 69%. Rasio belanja modal di Kabupaten Aceh Timur cenderung mengalami penurunan. Penurunan terjadi mulai tahun 2019 dan 2022. Sedangkan pada tahun 2023 mengalami kenaikan ymenjadi 14% dari tahun 2022 yaitu 11%. Jika kita melihat rata-rata rasio modal pada Kabupaten Aceh Timur dalam periode anggaran tahun 2019-2023 yaitu sebesar 17%. Menurut uraian dan perhitungan di atas bahwa sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Daerah masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal relatif kecil. Rasio Belanja Operasi masih sangat besar dibandingkan Rasio Belanja Modal. Besarnya alokasi dana untuk belanja operasi terutama dikarenakan oleh belanja pegawai yang relatif besar, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur lebih banyak mengeluarkan pengeluaran-pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas pemerintahan dan belum memperhatikan pembangunan daerah. Pemerintah daerah belum berkonsentrasi pada pemenuhan belanja modal, sehingga pemerintah daerah masih berkonsentrasi pada pemenuhan belanja operasi yang mengakibatkan belanja modal untuk Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur kecil atau belum terpenuhi. Harapan besarnya untuk Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam Menyusun perencanaan ditahun-tahun yang akan datang supaya dapat melakukan peningkatan dalam alokasi belanja modal. Dengan meningkatnya alokasi belanja modal dalam bentuk infrastruktur berbasis kebutuhan peningkatan ekonomi masyarakat dan katagori belanja modal lainnya yang dapat disraskan manfaat langsung dalam pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat.

#### IV. KESIMPULAN

Rasio kemandirian keuangan Kabupaten Aceh Timur rata-rata 10% selama periode (2019 – 2023), yang menempatkannya dalam kategori kemampuan keuangan rendah sekali. dengan pola hubungan Instruktif. Berdasarkan perhitungan pada tabel rasio efisiensi, seacara rata-rata dapat diamati bahwa perhitungan rasio efisiensi pemerintah daerah Kabupaten Aceh Timur pada tahun anggaran 2019-2023 yaitu 89,8 %, tergolong lebih efisien jika dibandingkan rasio efiseinsi tahun anggaran 2010-2018 pada pemeintah kabupaten aceh timur dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Krisniawati et,al (2021) yaitu rata-rata rasio efiseinsi sebesar 92,5%, artinya terjadi peningkatan efisiensi sebesar 2,7%. Namun, Jika mengamati trend pergerakan kurva diatas berdasarkan tahun ke tahun (2019-2023), dimana pada tahun 2019 rasio efiseinsi sebesar 77% tergolong dalam kriteria efisien, kemudian pada tahun 2020 rasio efisiensi sebesar 71%, pergerakan dari tahun 2019 ke tahun 2020 menunjukkan peningkatan efisiensi yang baik atau meningkat sebesar 6%, namun dari tahun 2020 – 2023 trend pergerakan rasio efisiensi mengalami pergerakan yang sangat tidak baik, bahkan tergolong dalam kriteria tidak efisien. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur harus terus berupaya dan menyusun strategi dan rencana eksekusi yang baik dan terukur dalam meningkatkan efisiensi dalam penegleolaan keuangan dan mengoptimalkan perolehan PAD dari belanja yang dikeluarkan pada tahun-tahun berikutnya. Tabel Perhitungan rasio efektivitas menunjukkan bahwa perhitungan tingkat kemampuan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam mencapai target perolehan PAD daerahnya secara rata-rata rasio efektivitas PAD tahun anggaran 2019-2023 yaitu 99,26%. Sehingga dapat disimpulkan secara rata-rata perolehan PAD dalam tahun anggaran 2019-2023 belum mampu mencapai 100% atau bahkan melampaui, secara kriteria pencapaian masih tergolong dalam kriteria tidak efektif. Rasio belanja operasi Kabupaten Aceh Timur dari tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi. Jika kita melihat rata-rata rasio operasi pada Kabupaten Aceh Timur dalam periode anggaran tahun 2019-2023 yaitu sebesar 69%. Sedangkan pada tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 14% dari tahun 2022 yaitu 11%. Jika kita melihat rata-rata rasio modal pada Kabupaten Aceh Timur dalam periode anggaran tahun 2019-2023

yaitu sebesar 17%, sebagian besar dana yang dimiliki pemerintah daerah masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal relatif kecil. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur belum berkonsentrasi pada pemenuhan belanja modal, sehingga pemerintah daerah masih berkonsentrasi pada pemenuhan belanja operasi yang mengakibatkan belanja modal untuk Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur kecil atau belum terpenuhi.

## V. REFERENSI

- Alifia Nabila Fitri, Laura Prisca, Jamil Kms M Thoriq. Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh Periode 2018-2022. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (Jrma)*. Volume 12, No. 1, Tahun 2024
- Darwanis, Ryanda Saputra. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dan Dampaknya Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh). *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*. Vol. 1, No. 2, September 2014, Hlm. 183-199
- Halim, A. (2001). *Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Halim dan Abdul. (2004). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Salemba: Jakarta
- Henda Hendawati, Dekrita Komarasakti, Surya Ansori. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Di Pemerintahan Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5 (3), 2017, 1643-1655
- Irnowati, Saripuddin D, Zainal Abidin. Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Makassar. *Jurnal Magister Manajemen Nobel Indonesia*, Volume 4 Nomor 3 Juni 2023. Hal. 403 – 416
- Krisniawati, Muhammad Zulkarnain, Yuliana. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Aceh Timur. *Ihtiyah Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*. Vol. 5 No. 1, September 2021
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Upp Stim Ykpn
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi: Yogyakarta
- Mohammad Mahsun (2012). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : BPF
- Puspita Geatri Br Perangin-Angin, Erisma Adi Natalian, Risma Wira Bharata. Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019-2022. *Manajemen Kreatif Jurnal (Makreju)*, Vol.1, No.3 Agustus 2023, Hal 173-183
- Raafi Melati Putri, Indri Yuliafitri, Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Operasional Tahun Anggaran 2019-2022 (Studi Kasus Pada Dinas-Dinas Di Kota Bandung). *OPTIMAL: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, Vol.4, No.1 Maret 2024
- Rigel Nurul Fathah. Financial Ratio Analysis For Performance Appraisal At Gunung Kidul District Government. *E B B A N K*, Vol. 8, No.1, Juni 2017. Halaman : 33 – 48

<https://e-ppid.bpk.go.id>

<https://aceh.bps.go.id/id>